

Seruan Perserikatan Bangsa Bangsa

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berkomitmen untuk menentang semua bentuk diskriminasi. Selama bertahun-tahun perhatian khusus telah diberikan untuk menanggulangi diskriminasi ras dan seksual, demikian pula diskriminasi terhadap individu karena kesehatannya, difabilitasnya atau afiliasi kepercayaan yang dianutnya. Akhir-akhir ini PBB telah menjadi semakin khawatir atas prevalensi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Para lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah orang-orang yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk kekerasan homofobik, pembunuhan, pemerkosaan, penahanan secara sewenang-wenang, diskriminasi meluas yang merambah hingga ke tempat kerja dan akses terhadap layanan-layanan dasar seperti perumahan dan kesehatan. **Di lebih 70 negara, homoseksual dinyatakan sebagai tindakan kriminal berdasarkan undang-undang setempat, sehingga jutaan orang bisa terkena ancaman penangkapan, dipenjarakan, dan bahkan dalam beberapa kasus dieksekusi.** Sekretaris Jenderal PBB, Komisaris Tinggi HAM, dan para kepala berbagai badan PBB semua telah menyerukan dekriminalisasi terhadap homoseksualitas di seluruh dunia dan tindakan lanjutan untuk melindungi para individu dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender mereka.

Badan-badan perjanjian HAM PBB yang berfungsi untuk memantau ketaatan Negara-negara Pihak berkenaan dengan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian-perjanjian HAM internasional, secara konsisten menyatakan bahwa **Negara mempunyai kewajiban, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian tersebut, untuk melindungi seluruh rakyatnya dari kekerasan dan diskriminasi karena orientasi seksual mereka.** Demikian pula, para pelapor khusus, para ahli independen, dan kelompok-kelompok kerja yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB untuk melaporkan tantangan-tantangan HAM, telah mengeluarkan berlusin-lusin laporan, pernyataan, dan permintaan yang menyoroti kerentanan setiap individu LGBT terhadap pelanggaran HAM dan menyerukan kepada negara-negara untuk mencabut atau mereformasi undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif.

Para Pejabat Senior PBB

“Undang-undang yang mengkriminalisasikan homoseksualitas merupakan suatu ancaman serius terhadap hak-hak dasar setiap individu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, mengekspos mereka terhadap ancaman penangkapan, penahanan, dan dalam beberapa kasus bahkan penganiayaan, dan eksekusi. Umumnya sanksi-sanksi kriminal diikuti oleh sejumlah tindakan diskriminasi lainnya yang berdampak pada akses terhadap berbagai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kami juga mengetahui bahwa kriminalisasi melanggar stigma dan berkontribusi terhadap iklim homofobia, ketidaktoleranan dan kekerasan.

- Komisaris Tinggi HAM PBB, Navi Pillai, 1 Februari 2011.

“Saya mendesak semua pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna menghapus stigma dan diskriminasi yang dihadapi oleh para lelaki yang mempunyai hubungan seksual dengan sesama lelaki, lesbian dan populasi transgender. Pemerintah juga harus menciptakan lingkungan sosial dan hukum yang memastikan penghormatan terhadap HAM dan memungkinkan akses universal terhadap pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan bagi HIV.”

- Direktur Eksekutif UNAIDS, Michel Sidibé, 17 Mei 2010

“Salah satu dari prinsip-prinsip dasar PBB adalah kepercayaan kita akan harkat dan martabat setiap orang, tanpa adanya perbedaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, milik, status kelahirannya maupun status lainnya. Segala bentuk diskriminasi yang masih terus berlanjut menggerogoti prinsip dasar ini muncul dalam menanggulangi HIV/AIDS dimana stigmatisasi lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki dan penolakan memberikan layanan pengurangan dampak buruk bagi pengguna narkotik merupakan kemunduran bagi kerja-kerja pencegahan dan pengobatan.”

- Administrator Program Pembangunan PBB Helen Clark, 10 Desember 2009

“Organisasi Kesehatan Dunia menghapus homoseksualitas dari Klasifikasi Internasional tentang berbagai Penyakit pada 17 Mei 1990. Hal ini merupakan langkah kemajuan yang penting. Namun, dua dekade kemudian, stigma dan diskriminasi terhadap homoseksual masih tetap ada dan dapat menyebabkan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan melesetnya target program kesehatan...”

- Direktur Jenderal WHO, Margaret Chan, 8 April 2011

Para Ahli Independen HAM PBB

(Para pelapor khusus dan para ahli lainnya yang menerima mandat dari Dewan HAM PBB)

“Eksistensi berbagai undang-undang yang mengkriminalisasi perilaku homoseksual antara orang-orang dewasa yang bersetuju secara pribadi dan penerapan pidana terhadap para tertuduh yang berperilaku seperti itu, melanggar hak privasi dan hak untuk bebas dari diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik.”

- Pendapat yang diambil oleh Kelompok Kerja PBB mengenai Penahanan Secara Sewenang-wenang, 2 Februari 2007

“Pelapor Khusus mempunyai keprihatinan yang mendalam tentang terus berlanjutnya kampanye-kampanye penghinaan dan ancaman kekerasan terhadap para pembela hak-hak kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender.”

- Laporan dari Pelapor Khusus PBB mengenai keadaan para pembela HAM, 30 Desember 2009

“Kekerasan berdasarkan gender ... menjadi sangat akut apabila digabungkan dengan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau perubahan identitas gender. Kekerasan terhadap minoritas seksual semakin meningkat dan menjadi penting bagi kita untuk membahas tantangan-tantangan dari apa yang dapat dinamakan sebagai arena terakhir perjuangan HAM.”

- Presentasi laporan dari Pelapor Khusus PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, 10 April 2002

“Kekhasan regional dan nasional... atau sejarah, kebudayaan atau praktik-praktik keagamaan, meskipun penting dalam banyak hal, tidak membebaskan pemerintah dari tugas mereka untuk mempromosikan dan melindungi seluruh HAM dan kebebasan dasar dan untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut diberlakukan dan dihormati secara universal.”

- Pernyataan gabungan dari para pemegang mandat HAM PBB (tentang para pembela HAM; bentuk kontemporer dari rasialisme, diskriminasi rasial, xenophobia dan ketidaktoleranan lain yang berkaitan; kekerasan terhadap perempuan; dan hak setiap orang terhadap standar tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai), 23 Februari 2007

“Tidak ada hirarki dari alasan-alasan diskriminasi.”

- Laporan dari Pelapor Khusus PBB mengenai kebebasan beragama dan kepercayaan, 7 Februari 2008

Sekretaris Jenderal PBB

“Sebagai laki-laki dan perempuan yang mempunyai hati nurani, kita menolak diskriminasi secara umum, dan khususnya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Apabila seseorang diserang, diperlakukan dengan kejam, atau dipenjarakan karena orientasi seksual mereka, kita harus bersuara... Hari ini, banyak bangsa mempunyai konstitusi modern yang menjamin hak-hak dasar dan kebebasan. Akan tetapi, homoseksualitas masih dianggap kriminal di lebih dari 70 negara. Hal ini tidak benar. Benar, kita mengakui bahwa sikap sosial masih berperan kuat. Benar, perubahan sosial terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Namun, janganlah ada kebingungan ketika terjadi ketegangan antara sikap sosial dan HAM universal, maka haklah yang harus dimenangkan. Penolakan secara pribadi, bahkan penolakan masyarakat bukan merupakan alasan untuk menangkap, menahan, memenjarakan, melukai, ataupun menyiksa seseorang, tidak pernah.”

Versi asli brosur ini diterbitkan oleh Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM. Terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan oleh Kartini Asia Network dengan dukungan dari Komite Hari Internasional Melawan Homophobia dan Transphobia (IDAHO/International Day Against Homophobia and Transphobia)

“Semua umat manusia terlahir bebas merdeka dan mempunyai kesamaan martabat dan hak-haknya”.

– Deklarasi Universal HAM (Pasal 1)

“Di antara para tahanan, kelompok-kelompok tertentu mengalami diskriminasi ganda dan kerentanan, termasuk mereka yang gay, lesbian dan transgender.”

– Laporan dari Pelapor Khusus PBB mengenai penyiksaan dan kekejaman lainnya, ketidakmanusiawian, perlakuan-perlakuan atau hukuman-hukuman yang merendahkan, 9 Februari 2010

“Undang-undang HAM internasional mengharuskan negara-negara memastikan tidak mendiskriminasi dan memberikan persamaan (de jure dan de facto) berdasarkan gender, orientasi seksual dan identitas gender.”

– Laporan dari Pelapor Khusus PBB mengenai promosi dan perlindungan HAM ketika melawan terorisme, 3 Agustus 2009

“Pendekatan hak mendapatkan kesehatan mengharuskan negara mengdekriminalisasi perilaku konsensual sesama jenis, juga mencabut undang-undang yang mendiskriminasi orientasi seksual dan identitas gender, dalam rangka memenuhi kewajiban inti dari hak mendapatkan kesehatan dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk menikmati hak tersebut secara penuh.”

– Laporan dari Pelapor Khusus PBB mengenai hak setiap orang terhadap standar tertinggi kesehatan fisik dan mental yang dapat dicapai, 27 April 2010

Pedoman Hukum bagi Negara-Negara yang Dikeluarkan oleh Badan-badan Perjanjian HAM PBB

“Negara-negara Pihak (dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) harus menjamin bahwa orientasi seksual seseorang bukan merupakan halangan untuk mewujudkan hak-hak dalam Perjanjian. Di samping itu, **identitas gender diakui sebagai salah satu alasan diskriminasi yang dilarang.**”

– Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Komentar Umum no. 20 tahun 2009

“Perjanjian (mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) **melarang segala bentuk diskriminasi** dalam mendapatkan akses untuk dan mempertahankan pekerjaan atas dasar orientasi seksual.”

– Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Komentar Umum no. 18 tahun 2005

“Perjanjian internasional mengharamkan setiap bentuk diskriminasi terhadap akses kepada layanan perawatan kesehatan dan faktor penentu kesehatan yang mendasarinya, demikian juga untuk sarana dan hak untuk mengadakannya, atas dasar orientasi seksual.”

– Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya, Komentar Umum no. 14 tahun 2000

“Larangan terhadap diskriminasi menurut pasal 26 (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik) juga mencakup diskriminasi atas dasar orientasi seksual.”

– Keputusan Komite HAM PBB dalam kasus *X vs. Colombia* (2007)

“Negara-negara Pihak mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh anak manusia di bawah usia 18 tahun menikmati semua hak yang diatur dalam Konvensi, tanpa diskriminasi, termasuk mengenai “ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau aliran lainnya, asal nasional, etnik atau sosial, milik, difabilitas, kelahiran atau status lainnya. **Dasar-dasar ini juga mencakup orientasi seksual remaja dan status kesehatan mereka.**”

– Komite PBB untuk Hak Anak, Komentar Umum no. 4 tahun 2003

“Negara-negara Pihak (dalam Konvensi Melawan Penyiksaan) mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa sepanjang kewajiban yang muncul dalam Konvensi yang bersangkutan, undang-undang mereka dalam praktiknya **berlaku kepada semua orang, tanpa memandang... orientasi seksual mereka (atau) identitas transgender.**”

– Komite PBB Melawan Penyiksaan, Komentar Umum no. 2 tahun 2008

“Diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan seks dan gender berkaitan erat dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi para perempuan, seperti ras, etnisitas, agama atau kepercayaan, kesehatan, status, umur, kelas, kasta dan orientasi seksual serta identitas gender.”

– Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum no. 28 tahun 2010.

Pedoman yang Dikeluarkan oleh Badan-badan PBB

“**Hukum pidana yang melarang hubungan seksual antara orang-orang dewasa yang saling bersetuju secara pribadi seharusnya ditinjau, dengan tujuan untuk dibatalkan.**”

– Panduan Internasional tentang HIV/AIDS dan HAM, OHCHR dan UNAIDS (2006)

“Di seluruh dunia, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki dan kaum transgender mendapat pengucilan sosial tingkat tinggi dan penolakan atas kesetaraan. **Kemampuan mereka untuk mewujudkan potensi kesehatan mereka secara penuh terbatas oleh sejumlah aturan-aturan dalam undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan keanekaragaman seksual/gender.**”

– Laporan tentang Pencegahan dan Pengobatan HIV dan Infeksi Menular Seksual Lainnya pada Lelaki yang Berhubungan Seks Dengan Lelaki dan Populasi Transgender, WHO (2008)

“Pemerintah harus menjamin bahwa para anggota parlemen, polisi, hakim, para pejabat kementerian hukum diberi informasi berdasarkan bukti tentang epidemiologi HIV dan dipetakan terhadap **dampak buruk pada kesehatan masyarakat dan HAM dari undang-undang, kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik penghukuman yang berkaitan dengan lelaki yang berhubungan dengan lelaki dan orang-orang transgender.**”

– Lingkungan Hukum, HAM, dan Respons HIV pada Lelaki yang Berhubungan Seks Dengan Lelaki dan Orang-orang Transgender di Asia-Pasifik, Sebuah Agenda untuk Bertindak, UNDP (2010)



For more information:
United Nations Human Rights Office (OHCHR)
United Nations, New York, NY 10017
Email: LGBTHumanRights@un.org



Menanggulangi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender



United Nations